

LITERATUR REVIEW: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA

LITERATURE REVIEW: STUNTING PREVENTION POLICY IN INDONESIA

Ayla Miftakhul Jannah^{1*}, Erlin Kurnia¹, Wahyu Yulianto¹

¹Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana STIKES RS Baptis Kediri

*Email: aylamiftakhul04@gmail.com

ABSTRAK

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang mengancam kualitas hidup dan pencapaian SDGs di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pencegahan stunting, memahami kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan metode *literature review* dengan meninjau penelitian dan laporan terkait kebijakan, program, serta tantangan dalam mengatasi stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan stunting melibatkan intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang balita, dan pemberian vitamin, serta intervensi gizi sensitif seperti perbaikan sanitasi, pendidikan orang tua, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan regulasi, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas sektor. Tantangan yang dihadapi meliputi regulasi yang tidak selaras, keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta dampak pandemi COVID-19. Kesimpulannya, penanganan stunting membutuhkan pendekatan multidimensi melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat agar upaya penanggulangan stunting lebih efektif.

Kata Kunci: Kebijakan, Penggulangan, Stunting

ABSTRACT

Stunting is a growth disorder due to chronic malnutrition that threatens the quality of life and the achievement of SDGs in Indonesia. The study aims to evaluate the implementation of stunting prevention policies and understand the obstacles faced. The research method uses the literature review method by reviewing research and reports on policies, programs, and challenges in overcoming stunting. The results showed that stunting prevention involves specific nutrition interventions such as supplementary feeding, growth monitoring, vitamin administration, and nutrition-sensitive interventions such as improved sanitation, parental education, and family economic empowerment. However, program success is influenced by regulatory support, adequate budget allocation, and cross-sector coordination. Challenges faced include misaligned regulations, limited health workers, low public knowledge, and the impact of the COVID-19 pandemic. In conclusion, handling stunting requires a multidimensional approach through specific and sensitive nutrition interventions, continuous education, and strong cross-sector collaboration to make prevention efforts more effective.

Keywords: Policy, Eradication, Stunting

Pendahuluan

Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak, produktivitas, dan kualitas hidup mereka di masa depan. Di Indonesia, angka stunting yang masih tinggi menjadi perhatian utama karena dapat menghambat potensi generasi mendatang serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting di Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga ahli, terbatasnya anggaran, dan lemahnya koordinasi antara sektor-sektor yang terlibat (Herawati, 2022; Phitra, 2023). Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi karena mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, seperti posyandu (Pradana, 2021).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2018, telah meluncurkan delapan aksi konvergensi sebagai langkah untuk mempercepat penurunan angka stunting. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti analisis situasi, perencanaan kegiatan, rebus stunting, dan pengelolaan data yang lebih baik. Namun, hasilnya berbeda di setiap daerah. Beberapa daerah berhasil menurunkan angka stunting, tetapi banyak yang masih menghadapi kendala, seperti minimnya sumber daya dan dukungan (Nurva, 2023; Gusdiva, 2024).

Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan stunting, diperlukan penguatan kebijakan dan revisi peraturan daerah agar sesuai dengan peraturan nasional. Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan juga sangat penting, serta membangun sinergi

lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program. Solusi untuk mengatasi stunting di antaranya adalah meliputi peningkatan intervensi gizi yang spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan, konseling gizi, perbaikan sanitasi, dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di berbagai daerah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas acara dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi stunting secara nasional melalui *literature review*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau *literature review* untuk mengumpulkan informasi terkait penanggulangan stunting di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif berbagai penelitian dan laporan yang relevan, mencakup kebijakan, program, serta tantangan dalam upaya mengatasi stunting.

Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa platform akademik, seperti *Google Scholar*, *PubMed*, dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Kata kunci yang digunakan mencakup "penanggulangan stunting". Pada tahap awal pencarian, diperoleh enam jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini, yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis 6 jurnal terkait pencegahan stunting dengan data yang mencakup penulis dan tahun, judul jurnal, metodologi, hasil penelitian, dan publikasi. Berikut hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel ekstraksi:

Tabel 1. Data Ekstraksi Jurnal tentang Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia

Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil	Publikasi
Pradana, F.K., et al., 2021	Evaluasi Proses dalam Program Penanganan Stunting di Semarang	Kualitatif dengan metode wawancara dan observasi	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program melibatkan tenaga gizi dan kepala puskesmas, namun pandemi covid 19 menyebabkan perubahan signifikan, seperti layanan posyandu yang digantikan dengan kunjungan rumah (<i>door-to-door</i>) dan penyuluhan yang dilakukan secara online melalui WhatsApp. Pelaksanaan program meliputi lima kegiatan utama, yakni pelacakan balita, pemberian MPASI, penyuluhan, konseling gizi, dan pemberian vitamin. Meskipun pemantauan <i>door-to-door</i> efektif, hal ini menambah beban bagi kader posyandu, dan pemberian PMT, khususnya paket F100, terhambat. Penyuluhan online melalui WhatsApp dinilai kurang efektif, sementara konsultasi gizi dan pemantauan vitamin A juga menjadi masalah. Monitoring menunjukkan bahwa empat dari lima kegiatan program stunting tidak mencapai target. 2. Upaya penanganan stunting : a. Program stunting melibatkan pemantauan rutin balita di posyandu, pemberian PMT dan F100, penyuluhan kesehatan dan konseling gizi di posyandu, serta pemberian vitamin dan mineral. Pemantauan <i>door-to-door</i> , penyuluhan online, pembentukan posyandu kecil di tingkat RT.	Jurnal: <i>Higeia journal of public health Research and Development</i> , Volume 5; eISSN 2686-3472, Accred: sinta 3
Dewi Marhaeni Diah Herawati dan Deni Kurniadi Sunjaya, 2022	<i>Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting</i>	<i>Qualitative with an implementation research</i>	1. Hasil penelitian ini ditujukan untuk praktisi, pemerintah, dan akademisi yang terlibat dalam kebijakan dan program pengurangan stunting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian	Jurnal: <i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> , Volume 19 ;

<i>Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study</i>	A	menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten, implementasi kebijakan penurunan stunting berjalan dengan baik karena dukungan regulasi, kontrol, dan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, di tingkat kecamatan dan desa, hanya aspek akseptabilitas, kesesuaian, dan cakupan intervensi tertentu yang berjalan dengan baik. Di desa, tingkat akseptabilitas hanya sebagian terlaksana. Hambatan utama di tingkat kecamatan dan desa termasuk kurangnya komitmen, kapasitas staf yang terbatas, koordinasi yang buruk, pemahaman yang kurang tentang stunting, dan pengaruh politik lokal. Akibatnya, beban penurunan stunting kembali menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.	ISSN 1660-4601(online), Terindeks scopus Q2	
2. Upaya penanganan yaitu: a. Dilakukan delapan aksi konvergensi b. Program intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif c. Kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor lainnya				
Phitra, F.A. et al., 2023	Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Kabupaten Merangin Tahun 2022	Deskriptif kualitatif	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam komponen input, Peraturan Bupati (Perbup) terkait stunting masih kurang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021. Ketersediaan tenaga kerja di tingkat Kabupaten dan desa yang belum memadai masih menjadi masalah, meskipun di desa yang berhasil, tenaga kerja sudah mencukupi. Alokasi dana di tingkat Kabupaten juga belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala (Perka) Nomor 12 Tahun 2021, yang mengharuskan dana untuk stunting mencapai 10% dari APBD, meskipun di tingkat desa, alokasi dana sudah terpenuhi. Dana untuk intervensi gizi spesifik lebih rendah dibandingkan dengan	Jurnal: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 12 ; ISSN 2620-4703(online), Accred: sinta 3

			<p>intervensi sensitif, meskipun keduanya berkontribusi penting, dengan 70% untuk intervensi gizi spesifik dan 30% untuk intervensi sensitif dalam menurunkan stunting.</p> <p>2. Upaya Penanganan stunting:</p> <p>a. Rembuk Stunting dengan koordinasi lintas sektor dilakukan secara berkala untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Selain itu, setiap bulan diadakan mini lokakarya di tingkat kecamatan dan rapat lintas sektor rumah desa sehat setiap 3 bulan sekali.</p> <p>b. Melaksanakan 8 aksi konfigurasi sebagai bagian dari strategi penurunan stunting, yang menunjukkan penurunan presentasi kasus stunting.</p>	
Liza Nurva,Chatila Maharani, 2023	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	<p>1. Analisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes menggunakan teori eksplorasi model implementasi kebijakan dari George Edward III, Marilee S. Grindle, dan Mazmanian & Sabatier dalam perspektif segitiga analisis kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan yang ada, dengan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang saling bekerja sama. Namun, terdapat banyak hambatan yang mengakibatkan kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Peraturan Bupati (Perbup) No. 50 Tahun 2019 perlu direvisi agar sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021.</p> <p>2. Upaya penanganan stunting :</p> <p>a. Upaya penurunan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik untuk meningkatkan gizi anak, seperti pemberian makanan tambahan,</p>	Jurnal: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 12 ; ISSN 2620-4703(online), Accred: sinta 3

			<p>pemantauan, pertumbuhan, pengobatan medis, dan penyuluhan gizi.</p> <p>b. Intervensi Gizi Sensitif, meskipun upaya ini tidak langsung mendukung gizi tetapi berpengaruh pada status gizi anak, seperti peningkatan sanitasi, pendidikan orang tua, perbaikan ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>c. Keterlibatan berbagai aktor dan lintas sektor sesuai peran dan kapasitasnya.</p>	
Abidin.U.W., et al .,2023	Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan stunting di Puskesmas mamasa	Deskripsi kualitatif	<p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan telah sesuai dengan prosedur yang dimulai dengan pemantauan pertumbuhan hingga distribusi PMT ke balita gizi kurang. Akan tetapi, pemberian makanan tambahan hanya diberikan pada saat posyandu melalui inisiatif kader posyandu dengan menarik iuran yang akan dialokasikan untuk memberikan PMT pada saat kegiatan posyandu setiap bulannya.</p> <p>2. Upaya penanganan stunting:</p> <p>a. Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan rutin setiap bulan melalui posyandu atau kunjungan rumah.</p> <p>b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita yang kekurangan gizi, meskipun distribusi hanya dilakukan di posyandu dan dibiayai melalui iuran kader posyandu.</p> <p>c. Kolaborasi Lintas Sektor seperti terlibatnya petugas gizi, bidan, dokter, perawat, lurah, kepling, dan kader posyandu dalam program penanggulangan stunting Dukungan Pemerintah melalui rapat koordinasi penanganan sanitasi dan</p>	<p>Jurnal: <i>Journal Pegguruang : Conference Series</i>, Volume 5; eISSN: 2686-3472, Accred: sinta 5</p>

			<p>pembangunan jamban keluarga. Dukungan juga datang dari Kementerian PUPR melalui Program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menyediakan hunian layak bagi keluarga.</p>	
Gusdiva.N., et al., 2024	Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok	Deskriptif kualitatif	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, kebijakan yang ada masih mengacu pada Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 yang sudah tidak relevan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, sehingga perlu revisi. Kedua, meskipun jumlah tenaga kesehatan seperti bidan desa memadai secara kuantitatif, jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan anggaran untuk intervensi gizi sensitif juga belum sepenuhnya tersedia pada tahun 2022. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang stunting, tingginya angka kemiskinan, dan kondisi ekonomi yang relatif rendah, yang menyulitkan calon orang tua dan orang tua dalam memberikan asupan gizi yang cukup bagi bayi.</p> <p>2. Upaya penanganan stunting :</p> <p>a. Intervensi gizi spesifik ini berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.</p> <p>b. Intervensi gizi sensitif meliputi berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, seperti pemberian bantuan makanan tambahan, bibit tanaman, penyuluhan,</p>	<p>Jurnal: Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Volume 9; ISSN 2548-1363(online), Accred : 5</p>

pendampingan keluarga
berisiko stunting, dan
layanan fasilitas
kesehatan.

Pembahasan

Hasil literature review yang diperoleh dari analisis enam jurnal adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Berbagai hambatan ditemukan dalam upaya penanggulangan stunting. Di tingkat lokal, kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas staf menjadi kendala utama, terutama di wilayah pedesaan. Faktor lainnya adalah regulasi yang tidak selaras antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, seperti Peraturan Bupati yang belum sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021, menghambat efektivitas program (Nurva & Maharani, 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, terutama di wilayah pedesaan, menjadi kendala utama (Gusdiva et al., 2024). Pandemi COVID-19 juga memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti posyandu (Pradana et al., 2021).

2. Upaya yang Dilakukan

Pemerintah telah menerapkan delapan aksi konvergensi sebagai strategi utama untuk mengatasi stunting, yang mencakup:

- 1) Perencanaan berbasis data.
- 2) Rembuk stunting secara berkala.
- 3) Intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan dan vitamin.
- 4) Intervensi gizi sensitif, termasuk perbaikan sanitasi, pendidikan gizi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Herawati & Sunjaya, 2022).

Selain itu, daerah seperti Kabupaten Merangin menunjukkan keberhasilan dengan melaksanakan koordinasi lintas sektor secara berkala melalui rembuk stunting (Phitra et al., 2023).

3. Analisis Keberhasilan dan Hambatan

Analisis kebijakan di berbagai daerah, seperti Brebes dan Kabupaten Meringin, menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting seringkali bergantung bergantung pada faktor-faktor berikut:

- 1) Dukungan anggaran daerah yang mengalokasikan anggaran sesuai dengan rekomendasi nasional (10% dari APBD untuk program stunting) cenderung lebih berhasil (Nurva & Maharani, 2023).
- 2) Edukasi yang berkelanjutan dan pemberdayaan kader posyandu terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini.
- 3) Beberapa daerah mengadopsi pendekatan inovatif, seperti pemantauan door-to-door dan penggunaan teknologi, meskipun efektivitasnya memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Namun, di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang stunting dan kondisi ekonomi keluarga menjadi tantangan signifikan (Gusdiva et al., 2024).

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Program

Untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting, berikut rekomendasi yang dapat diterapkan:

- 1) Revisi peraturan daerah agar sesuai dengan kebijakan nasional untuk memastikan keselarasan program.
- 2) Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk meningkatkan kualitas intervensi di lapangan.
- 3) Program edukasi yang menargetkan keluarga berisiko stunting, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Abidin et al., 2023).

- 4) Pemantauan yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Stunting merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Meskipun berbagai program telah menunjukkan hasil positif, tantangan implementasi kebijakan, terutama di tingkat lokal, masih perlu diatasi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting.

Kesimpulan

Stunting merupakan masalah kesehatan serius yang berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, dan kualitas hidup anak. Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan di beberapa daerah, terutama yang memiliki dukungan regulasi, alokasi anggaran yang memadai, dan koordinasi lintas sektor yang baik. Namun, tantangan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, regulasi yang belum harmonis, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta faktor sosial-ekonomi tetap menjadi penghambat utama. Upaya penanggulangan stunting memerlukan pendekatan integratif, dengan memadukan intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi masyarakat, serta inovasi pelayanan. Keberhasilan program juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan stunting, diperlukan harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional agar program lebih terarah dan terintegrasi. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu harus rutin dilakukan guna meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan intervensi di lapangan. Edukasi masyarakat, terutama kepada keluarga berisiko stunting, perlu ditingkatkan agar mereka memiliki

pengetahuan yang cukup mengenai gizi dan kesehatan. Pemerintah daerah juga harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan edukasi dapat menjadi solusi inovatif, meskipun perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat lokal. Terakhir, sinergi lintas sektor yang lebih erat antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam penanggulangan stunting.

Daftar Pustaka

- Abidin, U. W., Permatasari, R., & Yultrian, S. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting Di Pukesmas Mamasa. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 196-200.
- Gusdiva, N., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 35-47.
- Herawati, D. M., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy To Accelerate Stunting Prevention And Reduction At The Local Level In Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 3-11.
- Kemendes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022, Agustus Jumat). Mengenal Apa Itu Stunting. Retrieved December 1, 2024, From https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_Artikel/1388/Mengenal-Apa-Itu-Stunting.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : Jkki*, 74-81.
- Phitra, F. A., Lipoeto, N. I., & Yetti, H. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Dan

Penurunan Stunting Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Meringan Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : Jkki*, 127-136.

Pradana, F. K., Sariatmi, A., & Kartini, A. (2021). Evaluasi Proses Dalam Program Penanganan Stunting Di Semarang. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 581-590